



Tatakelola Informasi : Sebuah Perspektif Administrasi Publik

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Perspektif administrasi publik dalam
bidang pemerintahan

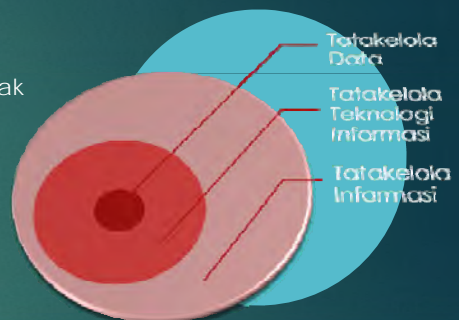
Public administration is the use of managerial, political and legal theories and process to fulfill legislative, executive, and judicial governmental mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as a whole or for some segments of it

Regulatory and services function (aspek-aspek tatakelola)



Istilah Penting Penerapan Tatakelola

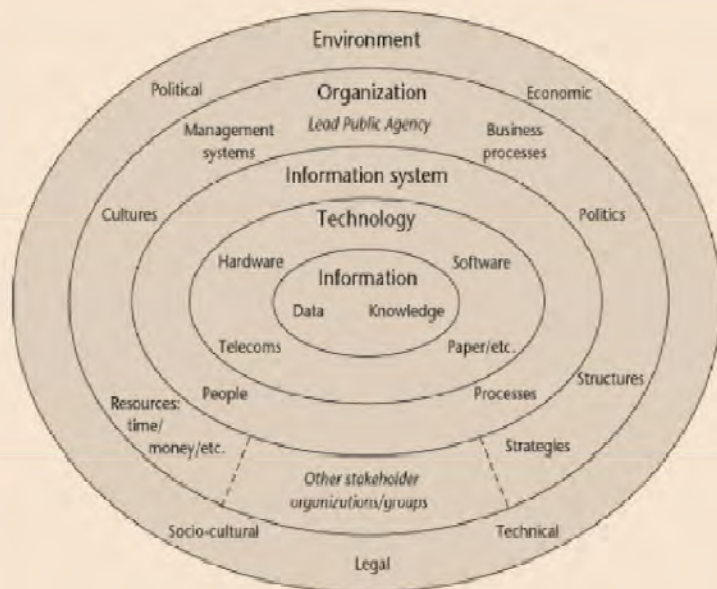
- ▶ **Mengatur dan mengurus (*regulatory and services function*):** mengelola layanan publik dan pembangunan baik melalui perundangan (pengaturan) dan pelaksanaan (pengurusan)
- ▶ **Tatakelola Informasi (*Information Governance*)** adalah spesifikasi hak dan keputusan serta kerangka akuntabilitas untuk memastikan perilaku yang sesuai dalam penilaian, pembuatan, penyimpanan, penggunaan, pengarsipan dan penghapusan informasi. Hal ini termasuk proses, peran dan kebijakan, standar dan metrik yang memastikan penggunaan informasi yang efektif dan efisien dalam memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya.
- ▶ **Tatakelola TI (*Information Technology governance*)** adalah struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan menambahkan nilai sambil menyeimbangkan risiko versus keuntungan atas TI dan prosesnya.
- ▶ **Tatakelola Data (*data governance*)** terdiri dari proses, metode, alat, dan teknik untuk memastikan bahwa data berkualitas tinggi, andal, dan unik (tidak diduplikasi), sehingga penggunaan hilir dalam laporan dan basis data lebih terpercaya dan akurat.



GOVERNANCE, GOVERNMENT, dan E-GOVERNMENT

- ▶ Konsep "pemerintah atau government" berkonotasi peran pemerintah yang lebih dominan. Sedangkan dalam pemerintahan itu menyiratkan bagaimana suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep pemerintahan diwujudkan unsur demokratis, adil, transparan, supremasi hukum, partisipasi dan kemitraan.
- ▶ *Good governance* : cara di mana kekuasaan dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Tata pemerintahan yang baik identik dengan manajemen pengembangan yang sehat
- ▶ Penerapan IT dalam pemerintahan :
 - ▶ "Virtual state" yang mengacu pada fakta penggunaan teknologi informasi dan jaringan telekomunikasi yang merembes ke semua tingkat pemerintahan.
 - ▶ "digital government" mencakup berbagai aplikasi dan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan yang termasuk dalam sektor publik.
 - ▶ "e-government", yang secara khusus mengacu pada penggunaan teknologi informasi, terutama dalam bentuk Internet, untuk menyediakan layanan publik.

Sistem Informasi sebagai Sistem Sosio-teknis



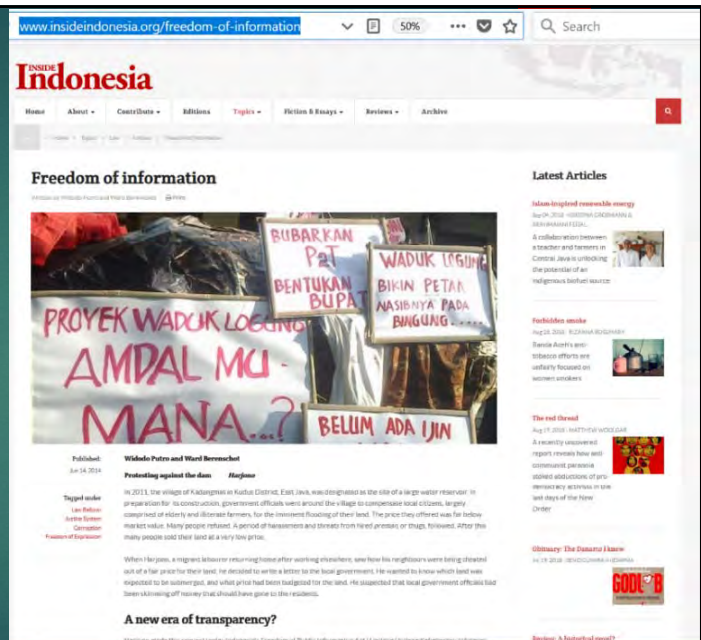
Model sistem informasi di pemerintahan sebagai sistem sosio-teknis (Heeks,2006)

Sistem Informasi sebagai Sistem Sosio-teknis

- ▶ Tampaklah pula semakin jelas pada diagram di slide sebelumnya bahwa tatakelola informasi di pemerintahan memang menjadi lebih tepat jika dilihat sebagai sistem sosio- teknis dan diletakkan dalam konteks tatakelola secara umum.
- ▶ Cara pandang dan pendekatan seperti ini di Indonesia dapat kita lihat di Keputusan Presiden Nomor 6/2001 yang menyatakan bahwa semua unit pemerintahan di berbagai tingkatan dianjurkan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai upaya mencapai *good governance*.
- ▶ Berkat keputusan ini, sampai Juni 2014 di Indonesia sudah ada 542 pemerintahan tingkat daerah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dalam kegiatan administrasi pemerintahan, walaupun pada umumnya baru di tingkat dasar, dan hanya 20% yang mencapai tingkatan interaksi dalam arti mulai menggunakan teknologi informasi untuk interaksi dengan publik (Suhadi *et. al.*, 2015).

Contoh Kasus :

Penyelewengan Wewenang Aparat terkait Keterbukaan Informasi Publik



The screenshot shows a web browser displaying the article "Freedom of information" on the website "INSIDE Indonesia". The article is dated April 14, 2014, and is categorized under "Waduk-Petir and Waduk Research". The main image shows a protest with signs that read "BUBARKAN PAT BENTUKAN BUPAT WADUK LOGUNG BIKIN PETAR NASIBNYA PADA BINGUNG... BELUM ADA IJIN" and "PROYEK WADUK LOGUNG AMPAL MUI MANA?". The article text discusses the village of Kibangmas in Kabupatén Aceh, Indonesia, and the impact of a large water reservoir project on local citizens, particularly elderly and illiterate farmers. It mentions that government officials were around the village to compensate local citizens, but they were not satisfied with the process. The article also mentions that the price they offered was far below what they asked. Many people said their land was a very low price. When I was in the village, I regret to say that many people were being offered out of a fair price for their land, but decided to write a letter to the local government. I also wanted to know which land was expected to be sold, and what price had been budgeted for the land. He suspected that local government officials had been skimming off money that should have gone to the residents.

Halaman berita kasus penyelewengan wewenang aparat terkait KIP
(Sumber : Inside Indonesia, 2014,
<http://www.insideindonesia.org/freedom-of-information>)

Intisari Berita :

Penyelewengan Wewenang Aparat terkait Keterbukaan Informasi Publik

- ▶ *“Pada tahun 2011, Desa Matamas di Jawa Timur, ditetapkan sebagai tempat penampungan air untuk masyarakat sekitar. Saat persiapan untuk pembangunannya, pejabat pemerintah daerah berkeliling desa untuk memberi kompensasi kepada warga setempat, sebagian besar terdiri dari petani tua dan buta huruf. Tanah para petanipun terkena dampak pembangunan tersebut. Harga yang pemerintah daerah tawarkan jauh di bawah harga pasar. Banyak warga menolak. Maka karena itu beberapa hari kemudian terjadi tindak pelecehan dan ancaman/intimidasi dari preman. Entah dari mana datangnya. Setelah terjadi hal yang tidak patut tersebut banyak petani menjual tanah mereka dengan harga yang sangat rendah.*
- ▶ *Ketika Harjono, seorang buruh migran yang baru pulang kampung (Desa Matamas) setelah bekerja di daerah lain melihat bagaimana tetangganya yang notabene adalah para petani pemilik lahan ditipu terkait harga tanah, dari harga yang pantas untuk tanah mereka. Harjono memutuskan untuk menulis surat permintaan kejelasan informasi kepada pemerintah daerah setempat.*

Intisari Berita :

Penyelewengan Wewenang Aparat terkait Keterbukaan Informasi Publik

- *Harjono mewakili masyarakat yang ingin tahu berapa harga yang telah dianggarkan untuk tanah mereka itu. Ia menduga bahwa pejabat pemerintah daerah setempat telah menggelapkan uang yang seharusnya diberikan kepada warga dan melakukan intimidasi melalui “orang-orang bayaran”. Harjono membuat surat permintaan keterangan terkait tanah tersebut atas dasar aturan yang jelas dan berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik atau UU KIP. UU yang lahir pada tahun 2008 dan diimplementasikan pada tahun 2010, UU ini mewajibkan semua badan publik dan lembaga pemerintah untuk memberikan informasi kepada warga tentang setiap aspek kegiatan dan kinerja mereka.*
- *Undang-undang juga mengatur ‘komisi informasi’ sebagai lembaga banding, yang dapat diubah oleh warga jika mereka merasa frustrasi dengan permintaan mereka. UU tersebut mewajibkan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional untuk menunjuk staf sebagai petugas atau pengelola informasi dan dokumentasi, serta menetapkan sanksi keras atas kegagalan untuk memberikan informasi yang diminta.*
- *Lahirnya UU KIP diperingati sebagai langkah besar menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. UU itu, diharapkan, akan memungkinkan warga untuk mendisiplinkan lembaga-lembaga negara atau publik dan aparatnya dengan memperjuangkan kejelasan dan keterbukaan informasi tentang malpraktik serta kinerja aparat.” (Sumber : Inside Indonesia, 2014, <http://www.insideindonesia.org/freedom-of-information>)*

Apa yang bisa kita Pelajari?

- ▶ Kita lihat kasus di atas, diperlukan kajian-kajian dari ilmu-ilmu sosial terapan seperti Administrasi Publik dan tentu saja Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
- ▶ Kita perlu mengungkap apa yang disebut “narasi dominan” (*dominant narrative*) di kalangan aparat dan pegawai di lembaga pemerintahan, termasuk di kalangan politisi, kelompok penekan, dan lembaga-lembaga swadaya yang memang ikut serta sekaligus memiliki kepentingan masing-masing dalam mengembangkan tatakelola.
- ▶ Tidak pula dapat kita abaikan peran kaum profesional atau teknokrat yang seringkali berada “di belakang layar” dalam pengembangan tatakelola informasi, sementara para elit politik dan pemerintahan mungkin lebih sering tampil membawakan narasi dominan yang berlaku di sebuah lembaga publik.

Kasus Tatakelola Informasi di lembaga Publik

- ▶ Tahun 2010 majalah Warta Ekonomi menyelenggarakan Warta Ekonomi E-Government Award untuk menilai peringkat lembaga pemerintah yang mengimplementasi tata cara pemerintahan secara elektronik (*e-government*).
- ▶ Penilaian dilakukan terhadap empat tahapan perkembangan, yaitu *web presence*, *interaction*, *transaction* dan *transformation*. Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) berhasil meraih peringkat 3.
- ▶ Kita dapat melakukan kajian lebih jauh tentang bagaimana tatakelola informasi di Perpustakaan Nasional sehingga mendapat peringkat 3 dan bagaimana peringkat ini berkembang di masa-masa berikutnya.

Lanjut...

- ▶ Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyatakan dalam laporannya, kebijakan mengenai pengelolaan informasi di lingkungan mereka masih dalam proses revisi dan memerlukan ketetapan dalam hal tatakelola informasi termasuk keterbukaan informasi publik.
- ▶ Unsur kerjasama antarunit di internal ANRI nampaknya mendapat perhatian, khususnya dalam hal komitmen untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.
- ▶ Dikatakan juga bahwa ada kekurangan dalam koordinasi antar unit kerja yang berkaitan dengan penyediaan informasi melalui situs resmi ANRI, khususnya yang bersifat wajib diumumkan secara berkala. Pengakuan-pengakuan pihak internal seperti ini seringkali lebih "jujur" memperlihatkan kondisi tatakelola sebuah institusi, katimbang pemeringkatan yang diberikan oleh pihak eksternal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mempertegas kekhasan kajian dan luaran di Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi FIA UB pada khususnya karena berada pada naungan Jurusan Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yaitu Tatakelola Informasi (*Information Governance*), khususnya dengan memperhatikan peningkatan profesionalisme setiap profesi di bidang kepustakawanan seperti :

- ▶ Pustakawan,
- ▶ Pengelola rekod,
- ▶ Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- ▶ Manajer pengetahuan,
- ▶ Konsultan informasi,
- ▶ Manajer aset digital,
- ▶ Dokumentalis,
- ▶ Analis informasi,
- ▶ Arsiparis
- ▶ Dsb

Tujuannya agar semakin dapat berperan aktif dalam tatakelola. Pemahaman yang sungguh-sungguh tentang kepustakawanan amatlah diperlukan dalam peningkatan kualitas profesi yang mulia ini.

Lanjut...

- ▶ Setiap lulusan Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi FIA UB hendaknya menjadi pionir dalam berbagai proses transformasi maupun reformasi. Pembahasan tentang aspek-aspek fundamental di makalah ini diharapkan dapat menyumbang kepada upaya mendeskripsikan potensi dan langkah bersama pemangku kepentingan majemuk (*multi-stakeholder*) di lembaga informasi atau dokumenter yang sinergis serta konstruktif dalam koridor tatakelola informasi Indonesia yang transparan, akuntabel dan profesional.
- ▶ Makalah ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran dan jaringan serta jangkauan profesional informasi di lembaga informasi atau dokumenter yang dapat aktif berkontribusi dalam membangun diskursus Tatakelola Informasi Indonesia.
- ▶ Sejalan dengan tiga butir di atas, maka saya merekomendasikan agar Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi FIA UB memperkuat kemampuan mahasiswa dan alumninya dalam menggunakan metode-metode baru dan adaptif untuk memahami peran mereka sebagai pemrakarsa dan pelaksana Tatakelola Informasi di Indonesia yang akan mampu menopang pembangunan Indonesia dalam koridor transformasi digital dan ekonomi digital.

SELESAI

TERIMA KASIH

Mari berdiskusi

